

Kesiapan Penerapan E-Government Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Indra Nauli Siregar

Mahasiswa Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Kota Padang

indranauli27@gmail.com

Abstract

E-government creates a new hope for the central and local governments in dealing with the improvement of the quality of public services that are more transparent, effective and efficient, the establishment of community participation and the existence of government accountability to the public which has an impact on the realization of governance. No exception the local government of South Tapanuli Regency which is trying to improve the quality of public services by implementing e-government. This study aims to analyze how the implementation of e-government in the South Tapanuli Regional Government, whether the preparations are in accordance with the targets to be achieved. The method used in this research uses a qualitative descriptive approach. By using qualitative descriptive, later it will be able to describe and describe the analysis of e-government. The research uses literature studies that utilize journals and internet media. The data collection technique is done through literature study. Literature study is carried out by searching various literatures from various related sources. Data can be retrieved from the South Tapanuli website and also journals. The results will discuss the readiness of the South Tapanuli Regional Government in implementing E-government, the obstacles that are passed, and analyze the website of the South Tapanuli Regional government.

Kata Kunci : E-government, Analysis, South Tapanuli

Abstrak

E-government menjadikan sebuah harapan baru bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menangani peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih transparan, efektif dan efisien, terjalannya partisipasi masyarakat serta adanya akuntabilitas pemerintah kepada publik yang berdampak pada terwujudnya tata kelola pemerintahan. Tak terkecuali Pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan E-government. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan E-government di Pemerintah Daerah Tapanuli Selatan, apakah persiapannya sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan deskriptif kualitatif, nantinya akan dapat menguraikan serta menggambarkan analisis tentang E-government. Penelitian menggunakan studi literature yang memanfaatkan jurnal dan media internet. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Studi pustaka dilaksanakan dengan mencari berbagai literatur dari berbagai sumber yang berkaitan. Data dapat diambil dari website Tapanuli Selatan dan juga jurnal. Hasilnya akan membahas tentang kesiapan Pemerintah Daerah Tapanuli Selatan dalam melaksanakan E-government, hambatan-hambatan yang dilalui, serta menganalisis website pemerintah Daerah Tapanuli Selatan.

Kata Kunci : E-government, Analisis, Tapanuli Selatan

1. Pendahuluan

Menurut Heeks (2001), e-government lahir karena dua revolusi: revolusi informasi dan revolusi pemerintahan. Kedua revolusi ini berdampak pada pola interaksi pemerintah dengan masyarakat dan bagaimana masyarakat dikelola. Sistem e-government secara umum didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di sektor publik untuk meningkatkan kualitas operasi dan memberikan layanan (Kumar dan Best, 2006).

Salah satu hasil penerapan e-Government adalah peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan publik melalui penyelenggaraan layanan publik secara online. Setiap masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan melakukan permohonan terhadap layanan public melalui sebuah aplikasi berbasis online yang terhubung dengan sistem internal instansi yang terkait.

Maka dengan adanya penerapan e-government ini pemerintah dapat menata sistem manajemen, pelayanan dan proses kerja pada pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu, dengan menerapkan sistem e-government ini, maka tercipta transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tatanan pemerintahan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip pada tata kelola pemerintah, dengan demikian adanya penerapan e-government pada sebuah pemerintah baik pusat maupun daerah dapat mewujudkan paradigma tata kelola pemerintah atau dengan istilah Good Government Governance.

Manfaat e-Government

Manfaat sistem e-government sendiri menurut instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 yaitu meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance). Dalam instruksi Presiden, penerapan sistem e-government diinstruksikan kepada seluruh entitas pemerintahan. Maka selain Pemerintah Pusat, semua Pemerintah Daerah juga ikut berlomba memberikan pelayanan perijinan yang lebih transparan dengan menerapkan sistem e-government tersebut.

Implementasi TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)

Pro-kontra, dampak positif-negatif, tentu selalu ada. Tetapi, saat ini, tidak ada satupun aspek kehidupan kita yang jauh dari TIK, terutama internet. Pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk salah satu fenomena penting pada abad ke-21 ini, yang mampu mengubah 'wajah' pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Dalam konteks e-government, kesiapan pelaksanaan e-government mengindikasikan kemampuan lembaga pemerintah dalam menggunakan TIK untuk merubah layanan publik yang sifatnya konvensional menjadi layanan publik berbasis teknologi. Makna kesiapan ini tidak hanya sebatas pada lingkup kelembagaan, namun termasuk juga kesiapan pada tata kelola, sumber daya manusia, hubungan antar institusi, infrastruktur, pendidikan, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan e-government. Keberhasilan inisiatif e-government bergantung pada sejauhmana institusi pemerintah mempersiapkan lembaganya untuk menyikapi kelemahan- kelemahan yang ada. Oleh karena itu mengukur kesiapan organisasi pemerintah adalah hal yang perlu dilakukan sebelum ataupun saat menerapkan e-government sebagai bahan evaluasi bagi instansi pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan E-government di Pemerintah Daerah Tapanuli Selatan, apakah persiapannya sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan deskriptif kualitatif, nantinya akan dapat menguraikan serta menggambarkan analisis tentang E-government. Penelitian menggunakan studi literature yang memanfaatkan jurnal dan media internet. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Studi pustaka dilaksanakan dengan mencari berbagai literatur dari berbagai sumber yang berkaitan. Data dapat diambil dari website Tapanuli Selatan dan juga jurnal.

3. Pembahasan

a. Kesiapan Pemerintah Daerah Tapanuli Selatan

- Kesiapan Tata Kelola

Hambatan yang dihadapi pemerintah daerah Tapanuli Selatan dalam tata kelola adalah belum adanya landasan hukum penerapan TIK dan e-government baik dalam bentuk peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah. Seperti rincian perencanaan dalam rencana kerja anggaran dan kegiatannya yang ditujukan untuk belanja barang dan pemeliharaan perangkat pengolah data, misalnya komputer, jaringan internet, dan lain sebagainya.

Landasan hukum sangat penting karena menjadi dasar pelaksanaan e-government organisasi pemerintahan selain sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah. Selain menjadi dasar pelaksanaan, keberadaan aturan hukum juga dibutuhkan agar dapat memastikan keamanan dan perlindungan data pengguna dalam hal ini masyarakat publik yang menggunakan layanan e- government.

- Kesiapan Infrastruktur TIK (Teknologi Informasi Komunikasi)

Infrastruktur teknologi informasi di Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dikatakan belum maksimal. Kurangnya anggaran menjadi masalah utama dalam ketersediaan fasilitas teknologi. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki jaringan internetnya sendiri serta mengelola jaringan komputer dengan anggarannya masing-masing. Jaringan komputer yang ada di OPD belum semuanya terkoneksi secara tersentralisasi. Untuk jaringan lokal pada umumnya OPD sudah menggunakan Wi-Fi, namun pada saat pengumpulan data ditemukan masih ada OPD yang

tidak terkoneksi internet. OPD yang tidak memiliki koneksi internet, dikarenakan anggaran untuk pembayaran jasa internet yang terbatas. Tidak semua daerah terjangkau jaringan internet yang sangat mempengaruhi proses pelayanan publik.

- **Kesiapan Kapasitas Sumber Daya Manusia**

SDM aparatur yang kompeten merupakan salah satu faktor utama keberhasilan implementasi e-government. Untuk melaksanakan layanan publik berbasis elektronik dalam kerangka e-government membutuhkan aparatur yang terlatih dan memiliki literasi TIK yang baik. Hal ini menunjukkan pentingnya SDM aparatur pemerintah yang memahami TIK karena bertindak sebagai pengguna sekaligus pemelihara berbagai aplikasi yang digunakan. Tanpa adanya SDM aparatur yang kompeten, kebutuhan akan keterampilan TIK akan beralih kepada pihak ketiga yang tentunya membutuhkan biaya belanja jasa, sehingga bisa dipastikan operasional aplikasi maupun infrastruktur TIK tidak akan bertahan lama.

Pengukuran pada aspek kemampuan TIK aparatur dapat dinilai dari bagaimana mereka memahami tentang penggunaan komputer, penggunaan perangkat mobile, pengetahuan tentang keamanan informasi, kemampuan mengatasi permasalahan teknis, kemampuan mengkonfigurasi hardware, kemampuan mengkonfigurasi software, dan kemampuan berbagi pengetahuan dengan orang lain.

- **Kesiapan dan Partisipasi Masyarakat**

Kesiapan masyarakat Tapanuli Selatan dalam pelaksanaan e-government dapat dikatakan belum tersosialisasi dengan baik, karena masih banyaknya masyarakat yang melakukan pelayanan publik masih secara konvensional. Dalam penerapannya secara umum berbagai keadaan menunjukkan bahwa Indonesia belum mendayagunakan potensi teknologi telematika secara optimal sehingga terjadi kesenjangan digital (digital divide) terhadap negara-negara maju serta kesenjangan antar daerah dan golongan dalam masyarakat Indonesia. Tanpa kesiapan masyarakat untuk terlibat dalam revolusi sistem kerja berbasis teknologi informasi dan komunikasi tersebut, maka dikhawatirkan masyarakat Indonesia akan sulit terserap dalam lapangan kerja bahkan di negeri kita sendiri apalagi untuk memajukan e-government daerah.

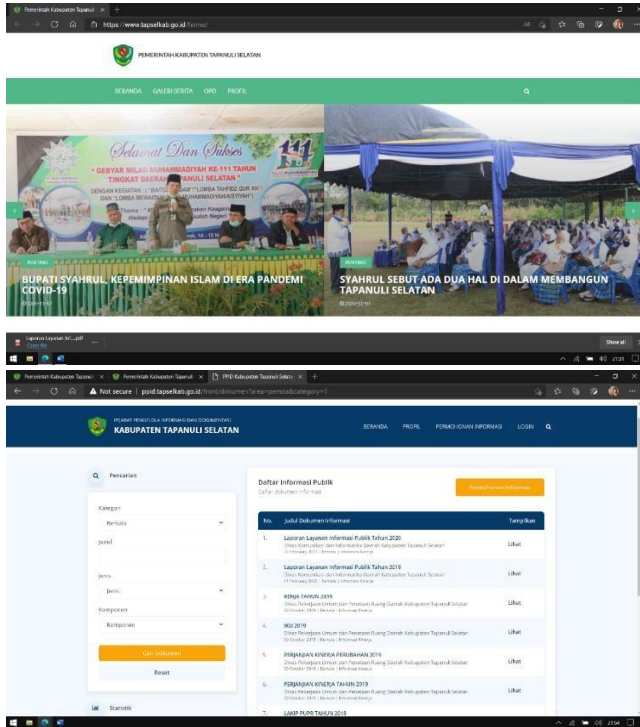
b. Hambatan Pelaksanaan E-Government di Kabupaten Tapanuli Selatan

Ada Beberapa hal yang menjadi hambatan pelaksanaan e-government di Kabupaten Tapanuli Selatan seperti SDM TIK, akses internet, anggaran, partisipasi masyarakat dan kemampuan TIK masyarakat.

Tetapi, yang perlu menjadi fokus utama pemerintah daerah Tapanuli Selatan adalah Partisipasi masyarakat, antusiasme masyarakat yang tinggi akan pelaksanaan e-government akan sangat berdampak terhadap perkembangan e-government. Dengan sosialisasi yang tepat, yang dapat

membuat masyarakat merasa nyaman dengan pelayanan online akan menjadikan kebiasaan baru bagi masyarakat dalam proses pelayanan publik.

c. Website Pemerintah Daerah Tapanuli Selatan



Pemerintah daerah Tapanuli Selatan membuat Tampilan Website dengan tampilan yang sederhana yang dapat dimengerti oleh semua kalangan masyarakat. Tetapi tetap memberikan informasi yang lengkap terkait pelaksanaan pelayanan publik dan juga memberikan gambaran yang sangat lengkap terkait visi dan misi Pemerintah Tapanuli Selatan Kedepannya

Dari segi Transparansi, Website Pemerintah daerah Tapanuli Selatan masih belum konsisten memberikan laporan keuangan tiap tahunnya. Tetapi setidaknya pemda sudah memberikan laporan yang cukup banyak untuk mengambil gambaran bagaimana proses penyelenggaraan pemda Tapanuli Selatan. Untuk informasi seperti pendapatan daerah tidak dapat diakses oleh sembarang orang, informasi tersebut hanya dapat dilihat dengan menggunakan akun tertentu. Laporan APBD tersebut juga hanya bisa dilihat oleh orang atau pihak tertentu.

4. Penutup

E-Government merupakan bentuk transformasi penyampaian layanan publik, meningkatkan interaksi antara warga dan pemerintah, menyederhanakan komunikasi dua arah antara warga dan pemerintah, meningkatkan efisiensi organisasi publik, dan penghematan uang pembayaran pajak. Salah satu hasil penerapan e-Government adalah peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan publik melalui penyelenggaraan layanan publik secara online. Dengan

adanya sistem e-government, menjadikan sebuah harapan baru bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menangani peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih transparan, efektif dan efisien, terjalannya partisipasi masyarakat serta adanya akuntabilitas pemerintah kepada publik yang berdampak pada terwujudnya tata kelola pemerintahan.

Dalam penerapannya, E-government di Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dikatakan masih butuh proses pengembangan lebih banyak lagi untuk mengembangkan sistem e-government yang sesuai. kesiapan E-government di Tapanuli Selatan terutama partisipasi masyarakat yang masih kurang untuk menjalankan pelayanan e-government sangat berpengaruh terhadap perkembangan E-government kedepannya, makanya dibutuhkan usaha pemerintah tapanuli Selatan yang lebih lagi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Referensi

- Rusdi, A, Putera, R. E, dan Kusdarini. (2022). ANALISIS E-GOVERNMENT DALAM PENERAPAN APLIKASI SAPO RANCAK DI DPMPTSP KOTA PADANG. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 26–48
- Putera, R. E. (2009). E-GOVERNMENT DAN REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH. *Demokrasi*, 8(1), 97–98.
- Adibowo, R., & Putri, S. O. (2016). PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM PARADIPLOMASI PEMERINTAH KOTA BANDUNG. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 91-100.
- Yudiatmaja, W. E., & Yoserizal. (2010). STRATEGI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MENGEMBANGKAN E-GOVERNMENT SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(1), 89–100
- Kurnia, T. S., & Rauta, U. d. (2017). E-GOVERNMENT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA. *Masalah - Masalah Hukum*, 170-181.
- Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-GOVERNMENT DENGAN PEMANFAATAN WEB OPENSID DALAM PELAYANAN PUBLIK DI NAGARI TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24.
- Triwahyuni, M., Putera, R. E., & Rahayu, W. K. (2020). INOVASI PELAYANAN KESEHATAN KELAS IMUD DI PUSKESMAS PADANG PASIR, KECAMATAN PADANG BARAT, KOTA PADANG, SUMATERA BARAT. *Jurnal Public Policy*, 6(1), 13.
- Salsabila, S, Zetra, A, dan Putera, R. E. (2022). PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN KTP PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG. *Jurnal Ilmu ADministrasi Negara*. 9(2), 314-324.
- Eriza, Aranzi, Yoserizal, dan Putera, Roni Ekha. (2021). INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ANDROID ‘ PAGA NAGARI ’ DI POLRES SOLOK KOTA. *JMPKP*.3(2), 12-22.
- Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-GOVERNMENT DENGAN PEMANFAATAN WEB OPENSID DALAM PELAYANAN PUBLIK DI NAGARI TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24.
- Ananda, B. R, Putera, R. E, dan Ariany, R. (2019). REFORMASI PELAYANAN PUBLIK DI POLRES SOLOK KOTA. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*. 2(2), 217–223.
- Ariany, R, & Putera, R. E. (2013). ANALISIS KINERJA ORGANISASI PEMERINTAH DALAM

MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA PARIAMAN. *Mimbar*. 29(1), 33–40.

Sa'adah, B. (2015). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ANGGARAN MELALUI E-GOVERNMENT (Studi tentang Penganggaran di Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar). *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 1-10.

Muflihah, Y & Susanto, T. D. (2017). FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WARGA DAN PEMERINTAH DALAM ADOPSI E-GOVERNMENT: SEBUAH ULASAN SISTEMATIS. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIIK)*, 304-310.